BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Laba

Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan untuk menghasilkan sebuah keluaran. Perusahaan berusaha menghasilkan sebuah keluaran yang nilainya lebih tinggi daripada nilai masukannya agar dapat menghasilkan suatu laba. Dengan laba yang diperoleh diharapkan perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya.

Pengertian laba usaha menurut pendapat yang dikemukakan oleh Soemarso S.R (2002:227), menyatakan bahwa :

> "Laba usaha adalah laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan".

Sedangkan menurut pendapat yang dikemukkan oleh J Wild, KR Subramanyan (2003:407), bahwa :

> "Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi akural".

Martono dan Harjito (2005:2) menjelaskan bahwa konsep laba merupakan konsep yang menghubungkan Antara pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan di satu pihak, dan biaya yang harus ditanggung atau dikeluarkan oleh pihak lain. Untung atau laba didefinisikan sebagai kenaikan modal saham dari transaksi yang bersifat insidental dan bukan meruapakan kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi perusahaan dalam periode tertentu (Hanafi dan Halim, 2005:59).

2.1.1.1. Laba Bersih

Laba bersih merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2005:25). Soemarso (2005:235) menjelaskan bahwa laba bersih (*net income*) merupakan selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya-biaya kerugian.

Abdullah (1993:289) dalam Manurung dan Siregar (2009:4) Menyatakan bahwa:

> "Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk seluruh periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi."

Harisson, *et al.* (2012:11) menyatakan bahwa laba (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi (misalnya, kenaikan aset atau penurunan kewajiban) yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang menyangkut transaksi dengan pemegang saham. Selanjutnya menurut Harisson, *et al.* (2012:13), laba bersih diperoleh apabila total pendapatan melampaui total beban. Dalam akuntansi, kata "bersih" merujuk pada jumlah setelah pengurangan.

Jadi, laba bersih adalah sisa laba setelah mengurangi beban dan rugi dari pendapatan dan keuntungan.

Laba bersih adalah laba operasi ditambah pendapatan nonoperasi (Seperti pendapatan bunga) dikurangi biaya nonoperasi (seperti biaya bunga) dikurangi pajak (Hongren (2005:73)),.

Adapun Rumus laba bersih yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Laba Bersih = Laba Operasi – Pajak Penghasilan

Sumber : Hongren (2005:73)

2.1.2. Kebijakan Hutang

2.1.2.1. Pengertian Kebijakan Hutang

Hutang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan “utang” yang pada saatnya harus dibayar kembali (Bambang Riyanto,2008:227)

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil perusahaan untuk melakukan pembiayaan melalui hutang, Kieso *et al* (2006) dalam Ratih Fitria Sari. Hal ini juga berkaitan dengan struktur modal yang dipilih perusahaan. Bagi pemilik perusahaan dengan menggunakan hutang pada tingkat tertentu harapan pemilik perusahaan bisa tercapai. Perusahaan dinilai berisiko apabila memiliki porsi hutang yang besar dalam struktur modal, namun sebaliknya apabila perusahaan mengunakan hutang yang kecil atau tidak sama sekali maka

perusahaan dinilai tidak dapat memanfaatkan tambahan modal eksternal yang dapat meningkatkan operasional perusahaan, Mamduh (2004).

Terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang (Mamduh, 2004), antara lain :

a. NDT *(Non-Debt Tax Shield)*

Manfaat dari penggunaan hutang adalah bunga hutang yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak perusahaan. Namun untuk mengurangi pajak, perusahaan dapat menggunakan cara lain seperti depresiasi dan dana pensiun. Dengan demikian, perusahaan dengan NDT tinggi tidak perlu menggunakan hutang yang tinggi.

b. Struktur Aktiva

Besarnya aktiva tetap suatu perusahaan dapat menentukan besarnya penggunaan hutang. Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan hutang dalam jumlah besar karena aktiva tersebut dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman.

c. Profitabilitas

Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasinya akan menggunakan hutang yang relatif kecil. Laba ditahannya yang tinggi sudah memadai membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan.

d. Risiko Bisnis

Perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang tinggi akan menggunakan hutang yang lebih kecil untuk menghindari risiko kebangkrutan.

e. Ukuran Perusahaan

Perusahaan yang besar cenderung terdiversifikasi sehingga menurunkan risiko kebangkrutan. Disamping itu, perusahaan yang besar lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan eksternal.

f. Kondisi Internal Perusahaan

Kondisi internal perusahaan menentukan kebijakan penggunaan hutang dalam suatu perusahaan.

2.1.2.2. Teori Kebijakan Hutang

1. *Trade off Theory*

Teori ini menganggap bahwa penggunaan hutang 100 persen sulit dijumpai. Kenyataannya semakin banyak hutang, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung. Satu hal yang penting bahwa dengan meningkatnya hutang, maka semakin tinggi probabilitas kebangkrutan. Beban yang harus ditanggung saat menggunakan hutang yang lebih besar adalah biaya kebangkrutan, biaya keagenan, beban bunga yang semakin besar dan sebagainya.

2. *Pecking Order Theory*

Teori *pecking order* menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan dimana para manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, hutang dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir (Mamduh, 2004). Penggunaan hutang lebih disukai karena biaya yang dikeluarkan untuk hutang lebih murah dibandingkan dengan biaya penerbitan saham. urutan pendanaan menurut teori *pecking order* adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan lebih menyukai *internal financing* (dana internal). Dana internal tersebut diperoleh dari laba yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan.
2. Perusahaan menyesuaikan target *dividen payout ratio* terhadap peluang investasi mereka, sementara mereka menghindari perubahan dividen secara drastis.
3. Kebijakan dividen yang *sticky* ditambah fluktuasi profitabilitas dan peluang investasi yang tidak dapat diproksi, berarti terkadang aliran kas internal melebihi kebutuhan investasi namun terkadang kurang dari kebutuhan investasi.
4. Apabila pendanaan eksternal diperlukan, pertama-tama perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman, yaitu mulai dari penerbitan hutang *convertible bond* , dan alternatif paling akhir adalah saham.

3. *Signaling Theory*

Brigham dan Houston (2004) menyatakan bahwa sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan modal baru dengan cara-cara lain seperti dengan menggunakan hutang. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manajer dan pemegang saham tidak mempunyai akses informasi perusahaan yang sama. Ada informasi tertentu yang hanya diketahui oleh manajer, sedangkan pemegang saham tidak tahu informasi tersebut sehingga terdapat informasi yang tidak

simetri (*asymmetric information*) antara manajer dan pemegang saham. Akibatnya, ketika struktur modal perusahaan mengalami perubahan, hal itu dapat membawa informasi kepada pemegang saham yang akan mengakibatkan nilai perusahaan berubah. Dengan kata lain, perilaku manajer dalam hal menentukan struktur modal, dapat dianggap sebagai sinyal oleh pihak luar (Mamduh, 2004).

Apabila manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik, dan ingin agar harga saham meningkat, perusahaan ingin mengkomunikasikan hal tersebut ke investor. Manajer dapat menggunakan hutang lebih banyak, sebagai sinyal yang lebih dapat dipercaya. Hal ini karena perusahaan yang meningkatkan hutang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Dasar pertimbangannya adalah penambahan hutang menyebabkan keterbatasan arus kas dan meningkatnya biaya-biaya beban keuangan sehingga manajer hanya akan menerbitkan hutang baru yang lebih banyak apabila mereka yakin perusahaan kelak dapat memenuhi kewajibannya. Investor diharapkan akan menangkap sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik. Dengan demikian hutang merupakan tanda atau sinyal positif.

4. Teori Keagenan

Berdasarkan teori keagenan, struktur modal perusahaan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi konflik antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Pemegang saham lebih menyukai tindakan perusahaan yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, sehingga mereka akan memperoleh dividen atas saham yang mereka miliki juga

akan meningkat. Namun pemegang hutang perusahaan tidak memperdulikan berapa besar tingkat keuntungan perusahaan, karena *pay-off* pemegang hutang.

2.1.2.3. Klasifikasi Hutang

Klasifikasi hutang dibagi menjadi dua yaitu:

1) Hutang jangka pendek

Hutang jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang normal, umumnya satu tahun atau kurang semenjak neraca disusun, atau utang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan. Hutang jangka pendek meliputi:

a. Hutang dagang (*Accounts payable*) adalah semua pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit.
b. Wesel bayar (*Notes payable)* adalah promes tertulis dari perusahaan untuk mmbayar sejumlah uang atas perintah pihak lain pada tanggal tertentu yang akan datang ditetapkan (utang wesel).
c. Penghasilan yang ditangguhkan (*Deferred revenue*) adalah penghasilan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan.Pihak lain telah menyerahkan uang lebih dahulu menyerahkan uang kepada perusahaan sebelum perusahaan menyerahkan barang atau jasanya.
d. Kewajiban yang masih harus dipenuhi (*Accrual payable)* adalah kewajiban yang timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan selama jangka waktu tetapi pembayarannya belum dilakukan (misalnya upah, bunga,sewa, pensiun, pajak harta milik dan lain-lain).

e. Hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo (*Maturing longterm debt)* adalah sebagian atau seluruh utang jangka panjang yang menjadi utang jangka pendek karena sudah waktunya untuk dilunasi.

2) Hutang jangka panjang

Hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu melebihi satu tahun. Yang termasuk hutang jangka panjang ialah:

a. Hutang hipotek (*Mortgage note payable)* adalah surat tanda berutang dengan jangka waktu pembayaran yang melebihi satu tahun, di mana pembayarannya dijamin dengan aktiva tertentu misalnya bangunan, tanah, atau perabot.
b. Hutang obligasi (*Bonds payable*) adalah surat tanda berutang yang dikeluarkan di bawah cap segel, yang berisi kesanggupan membayar pokok pinjaman pada tanggal jatuh temponya dan membayar bunganya secara teratut pada setiap interval waktu tertentu yang telah disepakati.
c. Wesel bayar jangka panjang (*Notes payable- long term*) adalah wesel bayar dimana jangka waktu pembayarannya melebihi jangka waktu satu tahun atau melebihi jangka waktu operasi normal.

2.1.2.4. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Kebijakan hutang dalam penelitian ini diukur dari *Debt to Equity Ratio* (DER) dikarenakan *Debt to Equity Ratio* mencerminkan besarnya proporsi antara *total debt* (total hutang) dan total modal sendiri. Menurut James C.Van Horne dan

Jhon M. Wachowicz Jr (2005:209) *debt to equity ratio* adalah rasio utang dengan ekuitas menunjukan sejauh mana pendanaan dari utang digunakan jika dibandingkan dengan pendanaan equitas."

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar penggunaan modal melalui hutang. Bagi perusahaan sebaiknya penggunaan hutang tidak melebihi modal sendiri. *Debt to Equity Ratio* dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal Sendiri}} \text{x} 100\%$$

(Bambang Riyanto, 2001:333)

Total utang yang dimaksudkan dalam rumus perhitungan diatas adalah seluruh total utang perusahaan baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dalam satu periode akuntansi. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* (DER) ini menunjukan perusahaan semakin berisiko, artinya perusahaan dengan penggunaan lebih dari 50% hutang dibandingkan modal sendiri, maka dalam pengembalian hutangnya perusahaan tidak cukup dana untuk membayar hutang tersebut.

Total debt merupakan total *liabilities* (baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang); sedangkan total modal sendiri merupakan total modal sendiri (total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukan komposisi dari total hutang terhadap total ekuitas. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* menunjukan komposisi total hutang semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur).

2.1.3. Kebijakan Dividen

2.1.3.1. Pengertian Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen mencakup penentuan penggunaan laba bersih untuk (1) mendanai investasi dalam bentuk laba ditahan, dan (2) imbalan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen (Handono Mardiyanto (2009:277)). Apabila laba ditahan ditambah, dividen malahan harus dikurangi. Pembagian dividen yang sebesar-besarnya jelas mamaksimalkan kekayaan pemegang saham saat ini. Namun, hal itu berarti mengurangi dana investasi tahun mendatang, yang justru akan mengurangi tingkat pertumbuhan laba dan juga menurunkan kekayaan pemegang sahan di tahun depan. Sebaliknya, jika laba ditahan diperbesar, dividen terpaksa dikurangi yang akan menurunkan kekayaan pemegang saham saat ini. Berdasarkan fakta itu, teori dividen sampai sekarang belum bulat menyimpulkan apakah pembagian dividen akan meningkatkan nilai perusahaan (harga saham) atau tidak.

Kebijakan dividen adalah keputusan tentang seberapa banyak laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen daripada ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan (Brigham dan Houston, 2001).

2.1.3.2. Teori Kebiajakan Dividen

Beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan yang tepat bagi perusahaan. Brigham dan Daves (2002:561-562) menyebutkan beberapa teori kebijakan dividen yaitu:

a. *Dividend Irrelevant theory*

Teori ini beranggapan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham (nilai perusahaan) maupun terhadap biaya modalnya. Kebijakan dividen yang satu sama baiknya dengan kebijakan dividen yang lain. Dijelaskan bahwa pendukung utama teori ketidakrelevanan ini adalah Miller dan Modiglani. Mereka menggunakan sejumlah asumsi, khususnya tentang ketiadaan pajak dan biaya pialang, *leverage* keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap biaya modal, para investor dan manajer mempunyai informasi yang sama tentang prospek perusahaan, distribusi laba ke dalam bentuk dividen atau laba ditahan tidak mempengaruhi biaya ekuitas perusahaan dan kebijakan *capital budgeting* merupakan kebijakan yang independen terhadap kebijakan dividen.

b. *Bird-in-The Hand Theory*

Menurut Gordon dan Lintner dalam Brigham dan Daves (2002:562), teori ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pemahaman bahwa sesungguhnya investor jauh lebih menghargai pendapatan yang diharapkan dari dividen dibandingkan dengan pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal karena komponen hasil dividen risikonya lebih kecil dari komponen keuntungan modal (capital gain). Para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal (capital gain) yang akan dihasilkan dibandingkan dengan seandainya mereka menerima dividen, karena dividen merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan sedangkan capital

gain merupakan faktor yang dikendalikan oleh pasar melalui mekanisme penentuan harga saham.

c. Teori Preferensi Pajak

Ada tiga alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi (Suwaldiman dan Aziz, 2007), yaitu:

a) Keuntungan modal (capital gain) dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen. Untuk itu, investor yang memiliki sebagian besar saham mungkin lebih suka perusahaan menahan dan menanam kembali laba ke dalam perusahaan. Pertumbuhan laba mungkin dianggap menghasilkan kenaikkan harga saham, dan keuntungan modal yang pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya tinggi.
b) Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai sahamnya terjual, sehingga ada efek nilai waktu.
c) Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Karena adanya keuntungan-keuntungan ini, para investor mungkin lebih senang perusahaan menahan sebagian besar laba perusahaan. Jika demikian para investor akan mau membayar lebih tinggi untuk perusahaan yang pembagian dividennya rendah daripada untuk perusahaan sejenis yang pembagian dividennya tinggi.

Kebijakan hutang sering diukur menggunakan *debt ratio* yang mencerminkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Oleh karena itu, semakin rendah DER (*debt to equity ratio*), semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Pada akhirnya peningkatan hutang akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham termasuk dividen yang akan diterima.

Kebijakan dividen dalam penelitian ini dikonfirmasi dalam bentuk *Dividend Payout Ratio* (DPR). Menurut Brigham dan Houston (2001), rasio pembayaran dividen adalah persentase laba dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk kas. *Proxy* dari kebijakan dividen yang dipilih untuk penelitian ini adalah *Dividend Payout Ratio (DPR)*, dengan alasan bahwa, DPR lebih dapat menggambarkan perilaku oportunistik manajerial yaitu dengan melihat berapa besar keuntungan yang dibagikan kepada *shareholders* sebagai dividen dan berapa yang disimpan di perusahaan.

2.1.3.3. *Dividend Pay Out Ratio* (DPR)

Rasio pembayaran dividen *Dividend Payout Ratio)* menentukan jumlah saldo laba dalam perusahaan sebagi sumber pendanaan. Akan tetapi, dengan menahan laba saat ini dalam jumlah lebih besar dalam perusahaan juga berarti lebih sedikit uang yang akan tersedia bagi pembayaran dividen saat ini. Jadi, aspek utama dari kebijakan dividen perusahaan adalah menentukan alokasi laba yang tepat antara pembayaran dividen dengan penambahan saldo laba perusahaan.

Perusahaan hanya dapat membagikan dividen semakin besar jika perusahaan mampu menghasilkan laba yang semakin besar, jika laba yang

dihasilkan besarnya tetap, perusahaan tidak bisa membagikan dividen yang makin besar karena hal ini berarti perusahaan akan membagikan modal sendiri (Suad Husnan (2001:316)).

Dividend payout ratio merupakan perbandingan antara *dividend per share* (DPS) dengan *earning per share* (EPS). *Devidend payout ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{DPR} = \frac{Dividen\ Per\ Share}{Earning\ Per\ Share} x\ 100\%$$

(Robert Ang, 1997:623)

Kebijakan dividen dapat diperoleh dengan membandingkan antara *dividend per share* dan *earning per shar*e. *Earning per share* dapat diperoleh dengan pengurangan laba bersih dengan dividen dibagikan kepada pemilik saham preferen lalu dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar (Nuringsih 2005).

Salah satu kebijakan deviden yang harus diambil oleh manajemen adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode akan dibagi sebagian untuk deviden dan sebagian lagi dibagi dalam laba ditahan.

2.1.4. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Neny Tirana & Susi H (2011)

Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 4 No. 1 Agustus 2011 ini dikemukakan oleh Neny Tirana & Susi H (2011). Penelitian ini berjudul Pengaruh arus kas operasi, laba bersih dan hutang terhadap kebijakan dividen (DPR) pada perusahaan manufaktur yang go Public di Bursa Efek Indonesia

tahun 2005-2009. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laba Bersih dan Hutang sebagai variable Independen. Sedangkan variable dependen yang digunakan adalah kebijakan dividen yang diukur dengan *Debt Payout Ratio.* Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Subjek penelitian dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia (2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Laba bersih dan hutang berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan dividen. Sehingga semakin tinggi hutang maka akan mempengaruhi besar kecinya laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham termasuk dividen yang akan diterima.

2. Penelitian Sisca Christianty Dewi (2008)

Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Volume 10 No. 1 April 2008 hal. 47-58 ini dikemukakan oleh Sisca Christianty Dewi (2008). Penelitian ini berjudul Penelitian ini berjudul Pengaruh kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan hutang sebagai variabel independen dan Kebijakan Dividen sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini adalah kebijakan hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen.menujukan bahwa semakin tinggi kebijakan hutang maka semakin rendah kebijakan dividen.

3. Penelitian David Irawam dan Nurdhiana (2011)

Penelitian ini berjudul Pengaruh laba bersih, arus kas operasi terhadap kebijakan dividen perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 - 2010. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laba Bersih sebagai variabel independen dan Kebijakan Dividen sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini adalah laba bersih berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2010.

4. Penelitian Agung Dwi Cahyo (2013)

Penelitian ini berjudul Pengaruh laba bersih, arus kas operasi, investment opportunity set terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur periode 2009 – 2012. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laba Bersih sebagai variabel independen dan Kebijakan Dividen sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini adalah laba bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.

5. Penelitian Muhammad Ridha Ramli dan Muhammad Arfan (2011)

Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Volume 4 No. 2 Juli 2011 hal. 126-138 ini dikemukakan oleh Muhammad Ridha Ramli dan Muhammad Arfan (2011). Penelitian ini berjudul pengaruh laba, Arus Kas operasi, arus kas bebas, dan pembayaran dividen kas sebelumnya terhadap dividen kas yang diterima oleh pemegang saham (studi pada perusahaan Manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laba sebagai variable Independen. Sedangkan variable dependen yang digunakan adalah dividen kas. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Subjek penelitian dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Laba berpengaruh secara parsial terhadap dividen kas.

6. Penelitian Mohammad Ebrahim & Arezoo Agher Chadegani (2011)

International Conference on Humanities, Society and Culkture, Volume 20. ini dikemukakan oleh Mohammad Ebrahim & Arezoo Agher Chadegani (2011). Penelitian ini berjudul *The relationship between earning, dividend, stock price and stock return: Evidence from Iranian Companies*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Earning* dan *Dividend* sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini adalah *Earning have a positive influence on dividend*.

7. Penelitian De Rembulan Ayundhasurya & Isrochmani Murtaqi (2012)

Journal of Business and Management, Volume 1 No. 3 2012 hal. 177-182 ini dikemukakan oleh De Rembulan Ayundhasurya & Isrochmani Murtaqi (2012). Penelitian ini berjudul *The effect of debt to equity ratio, divident payout ratio, and earning growth on price to earnings ratio in Indonesia's mining sector*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *debt to equity ratio* dan *dividend payout ratio* sebagai variable Independen. Subjek penelitian dilakukan pada *Indonesia's Mining Sector*. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa *Earning growth, DER and DPR combined have a influence to price earning in private mining companies in Indonesia*.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh arus kas operasi, laba bersih dan hutang terhadap kebijakan dividen (DPR) pada perusahaan manufaktur yang go Public di BEI tahun 2005-2009 **Neny Tirana & Susi H (2011)**	Laba bersih dan hutang berpengaruh simultan terhadap kebijakan dividen	Laba Bersih (X_2) Hutang (X_3) Kebijakan Dividen (Y)	Arus Kas Operasi (X_1) Perusahaan yang diteliti
2	Pengaruh kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen **Sicsa Christiany D (2008)**	Kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen	Kebijakan Hutang (X_3) Kebijakan Dividen (Y)	Kepemilikan Manajerial (X_1) Kepemilikan Institusional (X_2) Profitabilitas (X_4) Ukuran Perusahaan (X_5)
3	Pengaruh laba bersih, arus kas operasi terhadap kebijakan dividen perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2009 - 2010 **David Irawan (2012)**	Laba bersih berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan dividen	Laba Bersih (X_1) Kebijakan Dividen (Y)	Arus Kas Operasi (X_2)
4	Pengaruh laba bersih, arus kas operasi, investment opportunity set terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur periode 2009 - 2012 **Agung Dwi C (2013)**	Laba bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen	Laba Bersih (X_1) Kebijakan Dividen (Y)	Arus Kas Operasi (X_2) Investment Opportunity set (X_3) Perusahaan yang diteliti
5	pengaruh laba, Arus Kas operasi, arus kas bebas, dan pembayaran dividen kas sebelumnya terhadap dividen kas yang diterima oleh pemegang saham **Ramli dan Arfan (2011**)	laba bersih berpengaruh positif terhadap dividen kas	Laba (X_1) Membahas tentang dividen	Arus Kas operasi (X_2) Arus kas bebas(X_3) Pembayaran dividen kas sebelumnya (X_4) Dividen kas (Y)
6	*The relationship between earning, dividend, stock price and stock return: Evidence from Iranian Companies* **Mohammad Ebrahim & Arezoo Agher C (2011)**	Laba memiliki pengaruh positif pada dividen	*Earning (X_1) Dividend (X_2)*	*Stock Price (X_3) Stock Return (X_4)*
7	*The effect of debt to equity ratio, divident payout ratio, and earning growth on price to earnings ratio in Indonesia's mining sector* **De Rembulan A & Isrochmani M. (2012)**	Pertumbuhan Earning, DER dan DPR memiliki pengaruh untuk perolehan harga pada perusahaan pertambangan swasta di Indonesia	*Debt to Equity Ratio (X_1) Dividend Payout Ratio (X_2)*	*earning growth on price(X_3) earnings ratio(Y)*

2.2. Kerangka Pemikiran

Seiring dengan majunya suatu perusahaan, aktivitas operasional perusahaan juga semakin kompleks. Agar perusahaan tetap konsisten dan terus bisa tetap berkelanjutan serta mampu bersaing maka perusahaan harus memperoleh laba yang maksimal. Selain itu bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya kepada suatu perusahaan berupa saham, harus melakukan analisa terhadap kinerja perusahaan.

Sebuah perusahaan dikatakan memeperoleh keuntungan jika hasil penjualan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, sedangkan kerugian jika hasil penjualan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Di dalam suatu perusahaan laba terahir yang di perhitungkan biasanya disebut dengan laba bersih. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak penghasilan (Horngren, Datar dan Foster (2005:79)).

Laba bersih merupakan unsur paling utama dalam mengukur kinerja dan profitabilitas perusahaan, serta memberikan informasi mengenai perubahan kekayaan para pemegang saham. Besar kecilnya dividen yang dibagikan perusahaan tergantung dari kebijakan dividen yang ditempuh oleh perusahaan.

Kebijakan dividen ini tercermin dalam *dividend Payout Ratio* (DPR). Dalam menentukan DPR yang akan diberikan kepada pemegang saham tentunya perusahaan akan memperhatikan laba bersih yang diperoleh perusahaan karena dividen yang dibagikan kepada pemegang saham merupakan bagian dari

laba. Jika suatu perusahaan bisa memperoleh laba yang semakin besar, maka secara teoritis perusahaan akan mampu menetapkan DPR yang makin besar.

Perusahaan akan memperoleh utang baru atau menjual obligasi baru untuk membiayai perluasan perusahaan, sebelumnya harus direncanakan bagaimana caranya untuk membayar kembali utang tersebut. Apabila perusahaan menentukan bahwa pelunasan utangnya akan diambil dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut. Hal ini berarti, hanya sebagian kecil saja pendapatan yang dapat dibayarkan sebagai *dividend*. (Riyanto, 2001:202)

Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi laba ditahan yang ditahan sebagai cadangan bagi perusahaan (Ang, 1997). Persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen ini disebut *Dividend Payout Ratio* (Riyanto,1995).

Sudarsi (2002) menyatakan bahwa setiap perubahan dalam kebijakan pembayaran dividen akan memiliki dua dampak yang berlawanan. Apabila dividen akan dibayarkan semua kepentingan cadangan akan terabaikan. Sebaliknya bila laba akan ditahan semua, maka kepentingan pemegang saham akan uang kas juga terabaikan. Untuk menjaga kedua kepentingan, manajer keuangan harus menempuh kebijakan dividen yang optimal.

Martono (2005) dalam kebijakan dividen ini terdapat dua keputusan yang bisa diambil, yaitu apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan

dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang.

2.2.1. Hubungan Laba Bersih (X_1) dengan Kebijakan Dividen (Y)

Perusahaan memperoleh laba besar, maka perusahaan akan dapat membagikan dividen dalam jumlah besar dan harga saham diharapkan akan meningkat. Sedangkan saham yang banyak diminati juga akan mengalami kenaikan harga. Harga saham yang mengalami kenaikan dan penurunan menyebabkan perubahan pada jumlah pembagian Dividen (Bambang Riyanto, 2001:259).

Herni (2004) menyatakan bahwa untuk membayar deviden suatu perusahaan harus menganalisis faktor yang mempengaruhi alokasi laba untuk dividen atau untuk laba ditahan. Ada faktor utama yang harus dipertimbangkan, misalnya ketersediaan kas, karena walaupun perusahaan memperoleh laba namun jika uang kas tidak mencukupi maka ada kemungkinan perusahaan memilih menahan laba tersebut untuk diinvestasikan kembali bukan diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

Perusahaan hanya akan menaikkan Dividen apabila laba perusahaan akan naik. Laba bersih selalu dikaitkan sebagai salah satu indikator kemampuan perusahaan dalam membayar dividen sehingga perusahaan cenderung memelihara kebijakan Dividen secara teratur. Suatu perusahaan yang menaikkan pembayaran Dividen akan dipandang mempunyai harapan baik di masa akan datang karena harapan arus kas yang semakin meningkat yang dapat digunakan dalam

pembayaran Dividen. Sehingga Dividen dapat memberikan informasi mengenai arus kas di masa yang akan datang (Hery (2009:10)).

Penelitian Irawan dan Nurdhiana (2012) menyimpulkan bahwa Laba bersih yang diperoleh perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. M. Ramli dan M. Arfan (2011) juga menyatakan bahwa laba bersih berpengaruh positif terhadap dividen kas. Hal ini berarti bahwa Perusahaan yang memperoleh laba bersih yang besar akan cendrung memberikan dividen yang tinggi.

2.2.2. Hubungan Kebijakan Hutang (X_2) dengan Kebijakan Dividen (Y)

Indriyo Gitosudarmo dan Basri (2008:232) mengemukakan bahwa semakin besar dana untuk melunasi hutang baik untuk obligasi hipotek dalam tahun tersebut yang diambilkan dari kas maka akan berakibat menurunkan *dividend pay out ratio* (DPR) dan sebaliknya. Artinya dana dalam kas yang akan dibayarkan dividen kepada para pemegang saham harus rela dipakai untuk membayar hutang dibanding membayar dividen.

Handono Mardianto (2009:285) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen dipengaruhi oleh faktor alternatif sumber dana (kebijakan hutang) yaitu perusahaan akan memilih sumber dana internal (laba ditahan) daripada menerbitkan saham baru, yang mana akan menurunkan rasio pembayaran dividen.

Peningkatan penggunaaan hutang akan menurunkan tingkat konflik antar manager dan pemilik sehingga pemilik tidak terlalu menuntut pembayaran dividen yang tinggi (Sisca christiany D, 2008). Selain itu kebijakan hutang memiliki

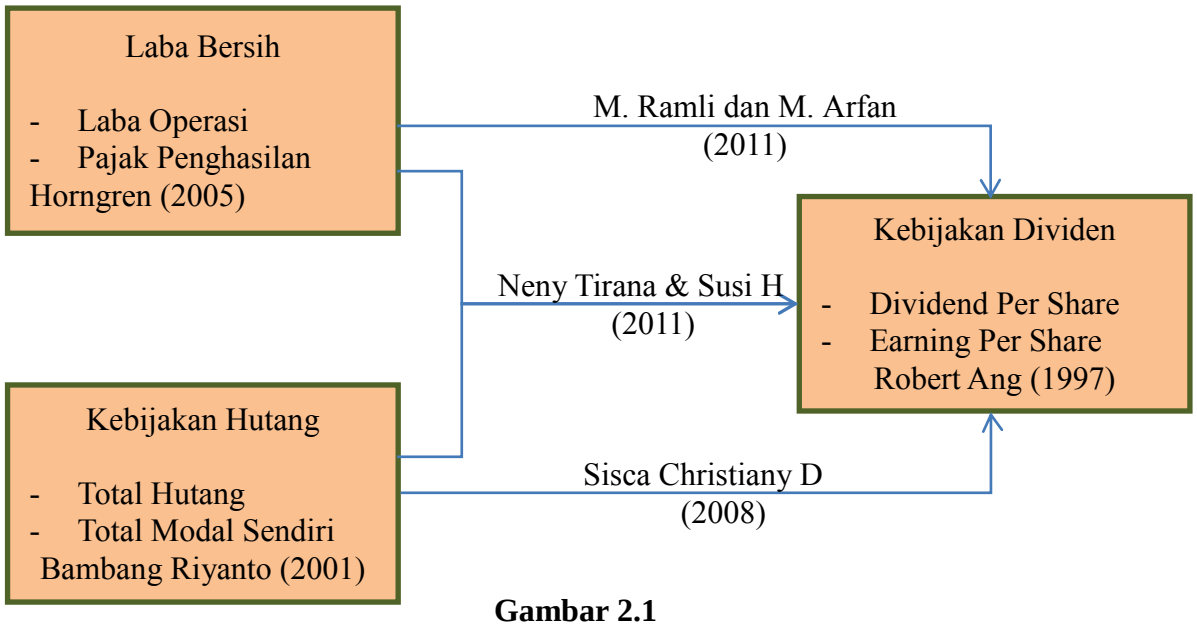
pengaruh negative terhadap kebijakan dividen, karena tingkat penggunaan hutang yang relative besar maka perusahaan akan membayar dividen yang tidak terlalu tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperhatikan kepentingan kreditur dan pemegang saham (Nuringsih, 2005).

2.2.3. Hubungan Laba Bersih (X_1), dan Kebijakan Hutang (X_2) terhadap kebijakan dividen (Y)

Semakin tinggi Debt to Equity Ratio semakin berkurang kemampuan perusahaan membayar dividen sebaliknya semakin turun Debt to Equity Ratio semakin tinngi kemampuan perusahaan membayar dividen. Komitmen perusahaan untuk melakukan pembayaran dividen secara teratur menyebabkan kemampuan pembayaran dividen tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang perusahaan bahkan kenaikan hutang dapat menigkatkan kemampuan perusahaan membayar dividen selama penggunaan hutang harus selalu diiringi dengan peningkatan laba perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori keuangan yang menyatakan jangan lakukan hutang baru jika tidak menghasilkan tambahan laba (Sartono (2001: 66)).

Laba bersih dan hutang terhadap dividen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen dikarenakan semakin tinggi hutang yang ditanggung perusahaan maka beban bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur juga semakin tinggi sehingga akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham termasuk dividen yang akan diterima (Neny Tirana & Susi Handayani, 2010),

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka dibuat gambar paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu dilakukan pembuktian dalam sebuah penelitian (Umi Narimawati,2011:7).

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian (Sugiyono, 2012:159). Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Laba Bersih dan Kebijakan Hutang terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut :

H1 : Laba Bersih berpengaruh positif secara parsial terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014

H2 : Kebijakan Hutang berpengaruh negatif secara parsial terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014

H3 : Laba Bersih dan Kebijakan Hutang berpengaruh secara simultan terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014